

# Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Persepsi Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan Auditor Kantor Akuntan Publik

Henry W. Darmoko<sup>1)</sup> Djuwitawati Ratnaningtyas<sup>2)</sup>  
<sup>1),2)</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun

email : [hdarmoko@yahoo.co.id](mailto:hdarmoko@yahoo.co.id)

## Abstract

*The aim of this research is to know and analyze perception. Audit of Campaign Fund between Political Party, KPU and KAP. This research sample is stakeholder of election in Madiun Area east java using Cluster Random sampling method. This research use three respondent groups: Political Parties, KPU and KAP. The result of data analysis with MANOVA can be summarized that there are expectation gap of knowledge audit, quality audit, and responsibility of audit report between Political Parties, KPU and KAP.*

**Keywords :** *Audit of Campaign Fund, perception, Political Parties, KPU and KAP*

## Pendahuluan

Undang-undang 32 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya (UU No. 12 Tahun 2008) telah mengatur secara jelas tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Laporan Dana kampanye dalam Pemilukada serta Audit atas Dana Kampanye dalam Pemilukada. Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Dana Kampanye dan Audit Dana Kampanye adalah UU No.01 Tahun 2009 tentang Pemilu, DPR, DPD dan DPRD,

Khusus untuk pemilukada KPU telah mengeluarkan PKPU 69/2009 tentang Pedoman teknis kampanye pemilukada selain mengatur teknis kampanye juga mengatur pelaporan dan dana kampanye, PKPU 6/2010 tentang Pedoman pelaporan dana kampanye pilkada yang mengatur tentang format serta jenis laporan yang harus dibuat serta jadwal penyampaian laporan. Sedangkan dalam PKPU 7/2010 tentang Pedoman audit dana kampanye Pilkada Menegaskan bahwa audit yang dilaksanakan KAP adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedure*) serta menjelaskan prosedur prosedur dalam audit yang dilaksanakan oleh KAP.

Fenomena nyata dilapangan tentang dana kampanye dan audit dana kampanye dapat disimpulkan bahwa Laporan dana kampanye banyak yang dibuat secara asal tanpa memperhatikan ketentuan/aturan perundangan, demikian juga tentang penyampaiannya pada KPU, hal yang paling memprihatinkan adalah tidak menyampaikan laporan dana kampanye pemilukada. Fenomena tersebut jelas membuat proses audit menjadi lebih sulit.

Harapan masyarakat tentang audit dana kampanye tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan *expectation gap* (Yeni, 2000). Dalam penelitian Koh dan Woo (1998) mengemukakan *Expectation gap* terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang masyarakat atau pemakai laporan keuangan harapkan dari auditor dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor. Publik beranggapan bahwa auditor memainkan peranan sebagai "*watchdog*" yang melindungi para pemakai laporan keuangan dari adanya kecurangan-kecurangan (Thomas *et al*, dalam Yulianti2004).

Masyarakat berharap banyak atas audit penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh tim kampanye sebagai wujud dari transparansi atas laporan keuangan dana kampanye yang

mempunyai implikasi pada penetapan pemenang dalam pilkada, kenyataannya berdasarkan Husodo (2009) bahwa, hasil pemilu tidak terjamin akuntabilitas dan transparansinya karena pelaksanaan audit dana kampanye terjebak pada formalitas

Penelitian ini ingin menguji secara empiris ada tidaknya perbedaan persepsi tentang audit dana kampanye antara Partai politik, Komisi Pemilihan Umum dan auditor Kantor Akuntan Publik.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah ada perbedaan persepsi atas pengetahuan audit dana kampanye antara partai politik, komisi pemilihan umum dan kantor akuntan publik dalam pelaksanaan audit dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah ?
2. Apakah ada perbedaan persepsi atas kualitas audit dana kampanye antara partai politik, komisi pemilihan umum dan kantor akuntan publik dalam pelaksanaan audit dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah ?
3. Apakah ada perbedaan persepsi atas tanggungjawab laporan audit dana kampanye antara partai politik, komisi pemilihan umum, dan kantor akuntan publik dalam pelaksanaan audit dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah ?

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Bagi KPU, hasil dari penelitian ini akan bisa dipakai sebagai dasar dalam membuat pedoman, perencanaan, maupun pembinaan pada partai politik peserta pemilihan umum kepala daerah dimasa yang akan datang sehingga mempunyai persepsi yang sama atas pengelolaan dan audit dana kampanye dalam pemilihan umum kepala daerah.
2. Bagi Partai politik, hasil penelitian ini akan memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih jelas akan

proses audit dana kampanye dalam pemilihan umum kepala daerah, sehingga untuk pemilihan umum kepala daerah yang akan datang bisa lebih siap dalam hal pengetahuan dan tenaga yang diperlukan

3. Bagi Kantor Akuntan Publik, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai dasar dalam melakukan pembinaan dan pengembangan para auditornya sehingga menjadi lebih siap dalam melakukan audit dana kampanye dimasa yang akan datang.

### **Kajian Pustaka**

Dalam Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan bahwa Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota. (Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009).

Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009):

- dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye,
- terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya,
- dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau lisan,
- terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon, dan

- dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.

Menurut Boynton *et al.* (2001) audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan untuk menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut Aren *et al.* (2003) menyatakan bahwa auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti terkait informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Peraturan KPU No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010 menegaskan bahwa audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait yang dilakukan oleh KAP merupakan audit yang dilaksanakan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati (*agreed upon procedure*).

Akuntan publik sering kali diminta untuk melakukan suatu perikatan dengan prosedur yang disepakati, misalnya, apabila klien meminta dilakukan suatu pemeriksaan dengan prosedur tertentu atas suatu unsur, akun, atau item tertentu dengan harapan mendapatkan temuan

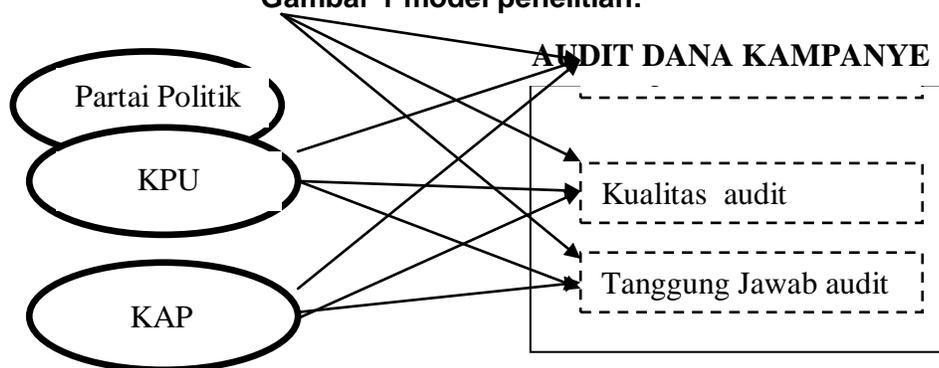
tertentu yang berguna untuk tujuan khusus pemakai laporan tertentu. Di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), pedoman mengenai perikatan dengan prosedur disepakati diatur dalam SA Seksi 622 tentang Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati Atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan, dan SAT Seksi 600 mengenai Perikatan Prosedur yang Disepakati.

### Hipotesis

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian adalah :

- H-1: Terdapat perbedaan persepsi atas pengetahuan audit dana kampanye antara Partai Politik, KPU dan KAP dalam pelaksanaan audit dana kampanye .pemilihan umum kepala daerah.
- H-2 : Terdapat perbedaan persepsi atas kualitas audit dana kampanye antara partai Politik, KPU dan KAP dalam pelaksanaan audit dana kampanye .pemilihan umum kepala daerah
- H-3 : Terdapat perbedaan persepsi atas tanggungjawab laporan audit dana kampanye antara partai Politik, KPU dan KAP dalam pelaksanaan audit dana kampanye pemilihan umum kepala daerah

**Gambar 1 model penelitian:**



### Metode Penelitian

#### Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan penyelenggaraan pemilihan umum, yang terdiri dari 3

kelompok (*cluster*) yaitu : Partai Politik (Parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia.

Untuk kepentingan penelitian ini, diambil sampel penelitian diambil berdasarkan lokasi penelitian (obyek penelitian) di Wilayah Madiun, yang terdiri dari : 1. Kota Madiun, 2. Kabupaten Madiun, 3. Kabupaten Ngawi, 4. Kabupaten Magetan, 5. Kabupaten Ponorogo dan, 6. Kabupaten Pacitan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Cluster Random sampling* dimana pemilihan sampel dilakukan secara acak berdasarkan kelompok atau cluster (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 128: 2002).

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Partai politik yaitu pengurus partai politik yang pernah mengusung calon pasangan kepada daerah, masing masing daerah 5 orang
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang telah menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah, masing masing daerah 5 orang,
3. Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang pernah mengaudit laporan dana kampanye pemilihan umum kepala daerah di wilayah Madiun, sejumlah 30 orang.

#### **Definisi Operasional Variabel**

1. Pengetahuan Audit, dalam penelitian ini adalah : Pengetahuan tentang laporan dana kampanye, Pengetahuan tentang kewajiban menyampaikan laporan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan umum, dan Pengetahuan tentang audit atas dana kampanye oleh auditor profesional dari KAP
2. Kualitas Audit, dalam penelitian ini adalah : Pengetahuan tentang pemeriksaan lapangan/ data oleh auditor, Pengetahuan tentang

independensi dan profesionalisme auditor, dan Pengetahuan tentang prosedur dan standar audit

3. Tanggung jawab Laporan Audit, dalam penelitian ini adalah : Pengetahuan tentang tanggung jawab tim kampanye dan pasangan calon kepala daerah, Pengetahuan tentang tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum, dan Pengetahuan tentang tanggung jawab auditor dana kampanye

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan skala interval atau (skala likert) lima tingkat dimana setiap pernyataan diberi lima kemungkinan jawaban, dengan jawaban terendah adalah 1. Sangat tidak setuju dan tertinggi adalah 5. Sangat setuju.

#### **Analisis Data**

1. Uji Kualitas Data (Instrumen)

Menurut Huck dan Cormis(1996), untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen, terdiri dari :

##### *Uji Validitas*

Untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut benar-benar mengukur konsep yang seharusnya diukur (Sekaran 2006). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Gozali 2001).

##### *Uji Reliabilitas*

Untuk mengetahui suatu alat ukur bebas dari bias, sehingga dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten antar waktu dan item dalam suatu instrumen. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil dari waktu ke waktu. (Gozali 2001).

2. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini digunakan uji *Multivariate of Analisis* (MANOVA) untuk menguji hipotesis bahwa terdapat *expectation gap* atas

pengetahuan audit, kualitas audit, dan tanggung jawab laporan audit dana kampanye antara partai politik, KPU dan KAP. Semua teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS.

## Pembahasan

### Analisa Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa secara total (Parpol, KPU dan

KAP), nilai minimum untuk variabel pengetahuan audit adalah 1,43 sedangkan nilai tertingginya 5.00. nilai minimum untuk variabel kualitas audit adalah 1,29 sedangkan nilai tertingginya 5.00. nilai minimum untuk variabel tanggung jawab audit adalah 1,29 sedangkan nilai tertingginya 5.00.

**Tabel 1 Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	90	1.43	5.00	3.2730	1.17504
Kualitas	90	1.29	5.00	3.2206	1.18078
Tanggung Jawab	90	1.29	5.00	3.2540	1.17233
Valid N (listwise)	90				

### Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas data dengan menggunakan SPSS, diketahui bahwa skor tiap tiap pernyataan untuk variabel pengetahuan audit, kualitas audit dan tanggungjawab audit terhadap nilai totalnya menunjukkan hasil yang signifikan yaitu 0.000 jadi dapat disimpulkan bahwa masing masing butir pernyataan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid (Ghozali, 2001).

Hasil uji reliabilitas data dengan menggunakan SPSS, diketahui bahwa nilai variabel pengetahuan audit, kualitas audit dan tanggungjawab audit memiliki nilai cronbach alfa lebih besar dari 0.60 sehingga dapat dikatakan handal(Ghozali, 2012).

### Uji Hipotesis

#### Uji Homogenitas

Dari hasil uji Homogenitas, sebagaimana dalam tabel 2 Levene's Test

of Equality of Error Variances, dapat terlihat bahwa :

1. Variabel pengetahuan audit dana kampanye, mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0.030 < 0.050$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan tentang pengetahuan audit dana kampanye antara partai politik, KPU dan KAP
2. Variabel kualitas audit dana kampanye, mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0.019 < 0.050$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan tentang kualitas audit dana kampanye antara partai politik, KPU dan KAP
3. Variabel tanggung jawab audit dana kampanye mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.050$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan tentang tanggung jawab audit dana kampanye antara partai politik, KPU dan KAP

**Tabel 2 Levene's Test of Equality of Error Variances(a)**

	F	df1	df2	Sig.
Pengetahuan	3.666	2	87	.030
Kualitas	4.154	2	87	.019
TJ	14.261	2	87	.000

### Uji Homogenitas Matriks Varian / kovarian

Dari hasil uji homogenitas matrik varian sebagaimana tabel 3 Box's Test of

Equality of Covariance Matrices dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.050$  sehingga dapat disimpulkan

bahwa matriks varian/ kovarian dari variabel dependen tidak sama

**Tabel 3 Box's Test of Equality of Covariance Matrices(a)**

Box's M	68.539
F	5.425
df1	12
df2	36680.538
Sig.	.000

**Uji Manova**

Dari hasil uji Manova sebagaimana tabel 4 Multivariate tests dapat diketahui bahwa *Pillai Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy's Largest Root* memiliki signifikansi  $0.000 < 0.050$  Artinya, harga F untuk *Pillai Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy's Largest Root*

semuanya signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : terdapat perbedaan persepsi antara Partai Politik, KPU dan KAP terhadap pengetahuan audit, kualitas audit dan tanggung jawab laporan audit dana kampanye pemilihan umum kepala daerah.

**Tabel 4 Multivariate Tests(c)**

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.990	2748.197(a)	3.000	85.000	.000
	Wilks' Lambda	.010	2748.197(a)	3.000	85.000	.000
	Hotelling's Trace	96.995	2748.197(a)	3.000	85.000	.000
	Roy's Largest Root	96.995	2748.197(a)	3.000	85.000	.000
RESP	Pillai's Trace	1.066	32.749	6.000	172.000	.000
	Wilks' Lambda	.070	78.909(a)	6.000	170.000	.000
	Hotelling's Trace	11.374	159.238	6.000	168.000	.000
	Roy's Largest Root	11.200	321.062(b)	3.000	86.000	.000

a Exact statistic

b The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

c Design: Intercept+RESP

Dari Tabel 5 tests of between-subjects effects, dapat diketahui bahwa :

- 1) Dalam hal pengetahuan audit diketahui bahwa hubungan antara persepsi (X) dengan pengetahuan audit ( $Y_1$ ) memiliki tingkat signifikansi  $0,000 < 0.050$  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi atas pengetahuan audit antara Partai politik, KPU dan KAP.
- 2) Dalam hal aspek kualitas audit diketahui bahwa hubungan antara persepsi (X) dengan kualitas audit ( $Y_2$ ) memiliki tingkat signifikansi  $0,000 <$

$0.050$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi atas kualitas audit antara Partai politik, KPU dan KAP.

- 3) Dalam hal aspek tanggungjawab laporan audit diketahui bahwa hubungan antara persepsi (X) dengan tanggungjawab laporan audit ( $Y_3$ ) memiliki tingkat signifikansi  $0,000$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi atas tanggungjawab laporan audit antara Partai politik, KPU dan KAP.

**Tabel 5 Tests of Between-Subjects Effects**

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Pengetahuan	109.795(a)	2	54.897	363.411	.000
	Kualitas	108.337(b)	2	54.169	300.513	.000
	TJ	111.564(c)	2	55.782	451.018	.000
Intercept	Pengetahuan	963.931	1	963.931	6381.041	.000
	Kualitas	933.349	1	933.349	5177.985	.000
	TJ	953.097	1	953.097	7706.121	.000
RESP	Pengetahuan	109.795	2	54.897	363.411	.000
	Kualitas	108.337	2	54.169	300.513	.000
	TJ	111.564	2	55.782	451.018	.000
Error	Pengetahuan	13.142	87	.151		
	Kualitas	15.682	87	.180		
	TJ	10.760	87	.124		
Total	Pengetahuan	1086.869	90			
	Kualitas	1057.368	90			
	TJ	1075.421	90			
Corrected Total	Pengetahuan	122.937	89			
	Kualitas	124.019	89			
	TJ	122.324	89			

### Kesimpulan, Keterbatasan Dan Implikasi

#### Kesimpulan

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa.

1. Terdapat perbedaan persepsi atas pengetahuan audit dana kampanye antara Partai Politik, KPU dan KAP dalam pelaksanaan audit dana kampanye .pemilihan umum kepala daerah. Sehingga hipotesis 1 penelitian ini tidak dapat ditolak
2. Terdapat perbedaan persepsi atas kualitas audit dana kampanye antara partai Politik, KPU dan KAP dalam pelaksanaan audit dana kampanye .pemilihan umum kepala daerah, Sehingga hipotesis 2 penelitian ini tidak dapat ditolak
3. Terdapat perbedaan persepsi atas tanggungjawab laporan audit dana kampanye antara partai Politik, KPU dan KAP dalam pelaksanaan audit dana kampanye pemilihan umum kepala daerah, Sehingga hipotesis 3 penelitian ini tidak dapat ditolak

#### Keterbatasan dan Saran

Sampel penelitian yang diambil hanya di wilayah Madiun (Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan) yang mempunyai budaya dan karekteristik wilayah dan kependudukan yang sama, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa di generalisir pada daerah yang memiliki budaya, karakteristik wilayah dan kependudukan yang tidak sama.

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel pada daerah yang memiliki budaya dan karakter wilayah dan kependudukan yang tidak sama dan lebih luas dengan menambah variabel yang diteliti.

#### Daftar Pustaka

Arens, Alvin dan James Loebbecke, 1994. *Auditing: An Integrated Approach*, 6<sup>th</sup> edition, Simon & Schuster Company, New Jersey.

- Boynton C, William dan Kell, Walter G, 1997. *Modern Auditing 6<sup>th</sup> edition*, Prentice Hall, 1996.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guy, D. M., dan J. D. Sullivan. 1988. *The Expectation Gap Auditing Standards. The Journal of Accountancy*, 165, 36-46.
- Husodo, Adnan Topan, 2008, Koordinator Divisi Korupsi Politik pada Indonesia Corruption Watch (ICW), *Dana Kampanye Disarang Penyamun*, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004. *Standart Profesional Akuntan Publik*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Huck dan Cormis, 1996. *Professionalism As A Form of Work Commitment, Journal of Vocational Behavior*.
- Koh, H.C. dan E-Sah Woo. 1998. *The Expectation Gap in Auditing. Managerial Auditing Journal*, 13 (3), 147-154.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 128: 2002 metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen, BPFE Yogyakarta
- Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010 tentang *Pedoman audit laporan dana kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
- Peraturan KPU No. 07 Tahun 2010 tentang *Pedoman audit laporan dana kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
- Peraturan KPU No. 22 Tahun 2009 Tentang *Pedoman Audit Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009*
- Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang *Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang *Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
- Sekaran, Uma, 2006. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach, 4<sup>th</sup> edition*, Jhon Wiley & Son Inc., Salemba Empat.
- Tan, Tong Han dan Alison Kao. 1999. *Accountability Effect on Auditor's Performance: The Influence of Knowledge, Problem Solving Ability and Task Complexity: Journal of Accounting Reseach* 2:209-223
- Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan terakhir Undang-undang No. 12 Tahun 2008*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
- Yeni, N. S. 2000. *Persepsi Mahasiswa, Auditor, dan Pemakai Laporan Keuangan Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Auditor*. Thesis program pasca sarjana tidak dipublikasikan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Yuliati; Retno; Jaka Winarna; dan Doddy Setiawan, 2007. *Expectation Gap Antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Dan Auditor Pemerintah*, diunduh tanggal 14 April 2010. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar,